

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI**

**Anisa Putri Sari**

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia  
[anisaputrisr@gmail.com](mailto:anisaputrisr@gmail.com)

**Utang Suwaryo**

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia  
[utang.suwaryo@unpad.ac.id](mailto:utang.suwaryo@unpad.ac.id)

**Novie Indrawati Sagita**

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia  
[novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id](mailto:novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id)

### **Abstrak**

*Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cipacing pada kelompok pengrajin sekaligus mengetahui apakah pemberdayaan tersebut mampu menciptakan ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Masalah penelitian difokuskan pada kelompok pengrajin Desa Cipacing yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga banyak yang mengalami gulung tikar. Di sisi lain, terdapat dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat atas dasar kondisi dan potensi yang dimiliki desa. Namun, apabila melihat dari kondisi kelompok pengrajin yang banyak mengalami gulung tikar, maka alokasi dana desa menjadi sebuah permasalahan. Penelitian ini menggunakan acuan teori pemberdayaan masyarakat oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dan teori ketahanan ekonomi oleh Briguglio. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa selama pandemi Covid-19 berlangsung, Pemerintah Desa Cipacing belum dapat memberikan pemberdayaan masyarakat terutama pada kelompok pengrajin, sebab telah ada kebijakan mengenai dana desa yang dianggarkan khusus untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT, dan program ketahanan pangan. Untuk menciptakan sebuah ketahanan ekonomi, maka kelompok pengrajin berinisiatif membentuk sebuah kegiatan yakni Lembur Tohaga Lodaya dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Medal Harapan Jaya. Dalam hal ini pemerintah desa mendukung penuh atas kegiatan tersebut dengan memfasilitasi kemudahan perizinan, agar secara legalitas organisasi dapat terjamin kelangsungan kegiatan usahanya.*

*Kata kunci : Kelompok Pengrajin, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Ketahanan Ekonomi.*

### **Abstract**

*The purpose of this article is to find out about community empowerment carried out by the Cipacing Village Government for groups of craftsmen as well as to find out whether this empowerment was able to create economic resilience during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques of observation, in-depth interviews, and documentation. The research problem was focused on a group of craftsmen in Cipacing Village who were affected by the Covid-19 pandemic so that many of them went out of business. On the other hand, there are village funds that are prioritized to finance community empowerment on the basis of the conditions and potential of the village. However, if you look at the condition of the group of craftsmen who have experienced bankruptcy, the allocation of village funds becomes a problem. This study uses the theory of community empowerment by Wrihatnolo and Dwidjowijoto and the theory of economic resilience by Briguglio. The results of the study concluded that during the Covid-19 pandemic, the Cipacing Village Government had not been able to provide community empowerment, especially for the craftsmen group, because there was a policy regarding*

*village funds specifically budgeted for the prevention and handling of Covid-19, BLT, and food security programs. To create economic resilience, the group of craftsmen took the initiative to form an activity, namely Overtime Tohaga Lodaya and Medal Harapan Jaya Joint Business Group (KUBE). In this case the village government fully supports these activities by facilitating the ease of licensing, so that the legality of the organization can ensure the continuity of its business activities.*

*Keywords: Craftsmen's Group, Community Empowerment, Village Government, Economic Resilience.*

## PENDAHULUAN

*Coronavirus Disease 2019* atau biasa disebut dengan Covid-19 merupakan virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok.<sup>1</sup> Covid-19 menyebar dengan sangat cepat dan sangat mudah menginfeksi manusia. Melalui *droplet*, seseorang dapat dengan mudah terpapar virus tersebut, baik itu melalui bersin, batuk, atau ketika sedang berbicara.<sup>2</sup> *World Health Organization* (WHO) menyerukan agar pemerintah negara di seluruh dunia segera melakukan langkah agresif guna menekan penyebaran Covid-19. Tiongkok sebagai negara pertama yang terpapar Covid-19 memberlakukan upaya luar biasa yakni *lockdown* atau karantina.

Penyebaran Covid-19 meluas dan berdampak pada berbagai sektor, terutama pada sektor ekonomi. *International Monetary Fund* (IMF) memberikan prediksi bahwa ekonomi global akan menurun 3 persen.<sup>3</sup> Begitupun di Indonesia, pada tahun 2020 Covid-19 berhasil di deteksi pertama kali.<sup>4</sup> Terjadi kenaikan kasus setiap bulannya, yang membuat Indonesia harus menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang sebelumnya belum pernah terjadi.

Data Kementerian Keuangan memaparkan bahwa Covid-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian domestik, seperti penurunan kinerja perusahaan, penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, ancaman pada sektor keuangan dan perbankan, hingga pada eksistensi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Adanya penurunan eksistensi UMKM ini mengakibatkan turunnya kinerja sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang pada akhirnya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan ancaman kesulitan pembayaran kredit.<sup>5</sup>

Otonomi daerah memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan dalam hal mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini berarti daerah memiliki kewenangan dalam

---

<sup>1</sup> Yuliana, "Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur," *Wellness And Healthy Magazine* 2 (2020).

<sup>2</sup> A. Shofiana, *Implementasi Program Afiliasi Berbasis Virtual Team Dalam UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19* (Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, 2020).

<sup>3</sup> Wan laura Hardilawati, "Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 10, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>.

<sup>4</sup> Jacko Ryan, "Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 02 (2022).

<sup>5</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020, <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.

membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat sebagai upaya untuk mempercepat adanya pembangunan desa. Pembangunan sebaiknya mengarah pada peningkatan masyarakat desa dengan pemberian sarana dan prasarana sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat demi menghasilkan pembangunan ekonomi daerah yang kokoh dan efektif.<sup>7</sup> Untuk mewujudkan sebuah pemberdayaan, maka perlu dukungan dari pengelolaan pembangunan yang partisipatif.<sup>8</sup>

Dalam melakukan pemberdayaan, tentu memerlukan dana yang dapat menunjang masyarakat untuk melaksanakan pemberdayaan tersebut, salah satunya melalui dana desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota, yang memiliki tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat. Adapun prioritas dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala desa agar terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat desa untuk menanggulangi kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat atas dasar kondisi dan potensi yang dimiliki desa, salah satunya dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal agar dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa, baik itu dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, hingga perluasan skala ekonomi masyarakat desa.<sup>9</sup>

Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, di masa pandemi Covid-19 menjadi fokus peneliti. Desa Cipacing adalah salah satu desa di Kecamatan Jatinangor yang dikenal dengan kerajinannya. Keahlian dalam membuat kerajinan pun diturunkan dari generasi terdahulu.<sup>10</sup> Tidak aneh apabila mayoritas masyarakat Desa Cipacing bermata pencaharian sebagai pengrajin, sebab pada desa ini terdapat

---

<sup>6</sup> Risno Mina, "Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>.

<sup>7</sup> Ayu Esteka Sari, Salamah Salamah, dan Albetris Albetris, "Dampak Dimensi Intellectual Capital Terhadap Knowledge Management Pendamping Desa Di Kabupaten Kerinci," *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.102>.

<sup>8</sup> Imanuel Natoralemba Tadanugi, "Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara," *Jurnal Ilmiah Administratie* 10, no. 1 (2020).

<sup>9</sup> Redaksi KPPN BKT, "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya," *KPPN Bukittinggi* (blog), 2021, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

<sup>10</sup> Tamimah, "Geliat Pengrajin Desa Cipacing," *Djatinangor* (blog), 2018, <http://djatinangor.com/2018/03/10/geliat-pengrajin-desa-cipacing>.

16 jenis kerajinan yang dikembangkan.<sup>11</sup> Produk kerajinan pun tidak hanya dipasarkan di sekitar Bandung dan Sumedang saja, melainkan telah dikirimkan dan memasok pada berbagai daerah Indonesia, bahkan hasil produksinya sampai ke luar negeri. Namun, sehubungan dengan pandemi Covid-19, pelaku UMKM Desa Cipacing banyak mengalami gulung tikar. Sehingga perlu didukung dan dicarikan solusi.<sup>12</sup>

Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa tentu dilakukan secara bertahap. *Pertama*, penyadaran, yang mana masyarakat diberikan motivasi atas kemampuan dan potensi yang dimiliki agar dapat terus mengembangkannya. *Kedua*, pengkapasitasan atau *capacity building*, meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai. *Ketiga*, pendayaan, masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang, agar leluasa untuk mengembangkan potensinya. Pemberian daya ini diberikan sesuai dengan kecakapan individu.<sup>13</sup>

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa pada kelompok pengrajin Desa Cipacing di masa pandemi Covid-19 dilakukan agar tercipta ketahanan ekonomi atau *economic resilience*. Ketahanan ekonomi mengacu pada kemampuan untuk pulih atau menyesuaikan diri dengan dampak negatif dari guncangan eksternal ekonomi.<sup>14</sup> Tidak hanya bertahan, namun beberapa individu juga berkembang, yakni mengubah dari keadaan yang penuh tekanan menjadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan diri.<sup>15</sup> Penelitian ini menggambarkan masyarakat Desa Cipacing khususnya kelompok pengrajin mengembangkan potensi yang dimiliki dalam menghadapi permasalahan global, yakni Covid-19 yang berdampak pada banyaknya UMKM Desa Cipacing yang mengalami gulung tikar. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cipacing di masa pandemi Covid-19 pada kelompok pengrajin untuk mewujudkan sebuah ketahanan ekonomi akan dikaji melalui teori pemberdayaan masyarakat oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, selanjutnya teori ketahanan ekonomi oleh Briguglio.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh Ita, Abdul, dan Lely dengan judul “*Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi*

---

<sup>11</sup> A. N. K. Putri, “Perjuangan Pengrajin Desa Cipacing Untuk Dapatkan Pengakuan,” *ayobandung.com* (blog), 2017, <https://www.ayobandung.com/finansial/pr-79624882/perjuangan-pengrajin-desa-cipacing-untuk-dapatkan-pengakuan?page=2>.

<sup>12</sup> I. Kurniawan, “Berkunjung ke Jatinangor, Wabup Sumedang Pastikan Bantu Pelaku UMKM,” *prfmnews.id* (blog), 2020, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13712105/berkunjung-ke-jatinangor-wabup-sumedang-pastikan-bantu-pelaku-umkm?page=2>.

<sup>13</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007).

<sup>14</sup> Lino Briguglio dkk., “Economic Vulnerability and Resilience,” *UNUWIDER* 55 (t.t.).

<sup>15</sup> Arina Romarina, “Economic Resilience pada Industri Kreatif Gunamenghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional,” *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016).

pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang”.<sup>16</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa diwujudkan melalui program-program sebagai berikut: peningkatan ekonomi produktif, peningkatan peran masyarakat, dan pengaktifan kelembagaan. Adapun kendala yang di alami pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan adalah kurangnya fasilitas, kurangnya partisipasi masyarakat desa, dan budaya malas dari masyarakat desa.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Indah, Maria, dan Wiwin dengan judul penelitian “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19”.<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dialami para pelaku UMKM Kabupaten Kediri terletak pada proses pemasaran produk. Sehingga strategi pemberdayaan yang dibutuhkan adalah pemberdayaan pemasaran produk secara *online* dan pemberdayaan inovasi produk UMKM agar beralih pada produk yang paling dibutuhkan di masa pandemi Covid-19, seperti masker dan *hand sanitizer*.

Terakhir, penelitian Arina Romarina melakukan penelitian dengan judul “*Economic Resilience pada Industri Kreatif Guna Menghadapi Globalisasi dalam Rangka Ketahanan Nasional*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif menjadi pilihan tepat dalam menjaga ketahanan ekonomi dari kondisi krisis global. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam rangka menghadapi globalisasi agar tercipta sebuah ketahanan nasional dapat dilakukan dengan membentuk ruang-ruang yang dapat menjadi pusat aktivitas interaksi di berbagai lintas pelaku ekonomi kreatif, baik itu dari sisi pemerintah, pelaku usaha, komunitas, maupun akademisi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, masih terbatasnya penelitian yang membahas mengenai pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa untuk mewujudkan sebuah ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneliti akan terfokus pada pemberdayaan masyarakat kelompok pengrajin yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan sebuah ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19 yang ditinjau melalui teori pemberdayaan masyarakat Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dan teori ketahanan ekonomi atau *economic resilience* oleh Briguglio. Bermula dari hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat kelompok pengrajin yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cipacing sekaligus ingin mengetahui apakah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah desa tersebut mampu menciptakan sebuah ketahanan ekonomi

---

<sup>16</sup> Ita Ulumiyah, “Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 5 (2013).

<sup>17</sup> Indah Andayani, Maria Veronika Roesminingsih, dan Wiwin Yulianingsih, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pendidikan Nonformal* 16, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20>.

terutama setelah UMKM Desa Cipacing banyak mengalami gulung tikar akibat pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Bogdan dan Tayloy yang dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang didalamnya berisikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu-individu serta dari perilaku yang telah diamati.<sup>18</sup> Pendekatan kualitatif digunakan peneliti sebab penelitian ini tidak memperoleh data dengan angka-angka, namun analisis yang sifatnya induktif dan hasil penelitian menekankan makna dari generalisasi. Tidak hanya itu, penelitian ini digunakan peneliti untuk mengetahui secara mendalam mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat kelompok pengrajin yang dilakukan pemerintah desa di masa pandemi Covid-19, sekaligus mengetahui apakah pemberdayaan masyarakat tersebut mampu menciptakan ketahanan ekonomi kelompok pengrajin di masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan adalah *editing* (pemeriksaan data), *classifying* (klasifikasi), *verifying* (verifikasi), dan *concluding* (kesimpulan).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pandemi Covid-19 berdampak ada berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi yang salah satunya berdampak pada eksistensi UMKM. Hal ini sangat disayangkan, sebab kontribusi UMKM terhadap PDB cukup besar. Begitupun yang terjadi pada UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing yang sempat mengalami gulung tikar akibat sulitnya mobilitas dalam hal pemasaran kerajinan tangan sebagai salah satu dampak dari pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengrajin, terdapat perbedaan antara kondisi UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan saat pandemi Covid-19 berlangsung. Sebelum pandemi Covid-19, 75 persen masyarakat Desa Cipacing berprofesi sebagai pengrajin. Pesanan produk kerajinan yang dipesan konsumen pun mencapai ribuan pesanan setiap bulannya. Para pengrajin saling bergotong royong agar mencapai jumlah produk yang diinginkan konsumen, sebab ilmu dalam membuat kerajinan telah diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga kelompok pengrajin dapat dengan mudah saling membantu membuat kerajinan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kerajinan tangan Desa Cipacing dijual pada berbagai daerah, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, kerajinan tangan Desa Cipacing

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2007).

bahkan mencapai pasar luar negeri. Hal ini membuat Desa Cipacing memiliki ciri khas sebagai desa dengan sentra kerajinan tangan. Berdasarkan pernyataan Kasi Pemerintahan Desa Cipacing, sebelum pandemi Covid-19, penghasilan pengrajin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, akibat pandemi Covid-19 melanda, hal yang terjadi malah sebaliknya, kelompok pengrajin kesulitan mendapatkan penghasilan.



Gambar 1. Kerajinan Tangan Desa Cipacing

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Saat pandemi Covid-19 berlangsung, terutama ketika pemerintah menyerukan kebijakan *lockdown* dan kebijakan serupa lainnya, UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing mulai kesulitan memasarkan kerajinan yang mereka miliki. Hal ini sangat disayangkan, sebab tempat wisata banyak ditutup pemerintah sehingga sangat berdampak pada pemasaran kerajinan. Sehingga banyak dari mereka yang mulai tidak memproduksi kerajinan akibat kurangnya modal dan sedikitnya konsumen yang memesan kerajinan. Beberapa pengrajin tetap berusaha memasarkan secara *online*, namun hasil yang didapat berbanding jauh dengan sebelumnya. Tidak sedikit pula pengrajin yang mencari pekerjaan lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu sebagai kuli bangunan, pekerja kebun, dan sebagainya.

Pemerintah pusat telah memberikan bantuan pada pelaku UMKM senilai Rp 2,4 juta rupiah untuk 12 juta pelaku UMKM sepanjang tahun 2020 dan berakhir pada Januari 2021.

Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha dan terdampak pandemi Covid-19 agar mampu menstimulus perekonomian dalam negeri yang sedang terpuruk.<sup>19</sup>

Meski bala bantuan berdatangan, kelompok pengrajin tidak dapat terus bergantung pada bantuan tersebut. Kelompok pengrajin tetap perlu mencari penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, perlunya upaya pemerintah selaku wakil masyarakat agar memberikan bimbingan, pendampingan, dan konsultasi penyediaan modal sekaligus fasilitas usaha untuk melaksanakan sebuah pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan sebuah pemberdayaan masyarakat, maka perlu dana untuk menunjang kegiatan pemberdayaan, terkait hal tersebut dana desa diprioritaskan dalam membiayai pemberdayaan masyarakat atas dasar kondisi dan potensi yang dimiliki desa. Namun, apabila melihat kondisi kelompok pengrajin yang banyak mengalami gulung tikar, maka alokasi dana desa menjadi sebuah permasalahan. Disamping itu, pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebuah upaya pemerintah desa setempat untuk mewujudkan tujuannya yakni kesejahteraan masyarakat.

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa Cipacing Terhadap Kelompok Pengrajin di Masa Pandemi Covid-19**

Setelah melakukan wawancara dengan aparat Pemerintah Desa Cipacing, pada kenyataannya, sejak pandemi Covid-19 melanda di Indonesia di tahun 2020-2022, pemerintah setempat belum sempat membuat sebuah pemberdayaan terhadap masyarakat desa, khususnya kelompok pengrajin. Hal ini disebabkan karena terdapat kebijakan bahwa selama pandemi Covid-19, anggaran dana desa difokuskan pada pencegahan dan penanganan Covid-19. Disamping itu, telah ada dana yang diberikan pemerintah khusus untuk UMKM terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, dana desa dianggarkan untuk pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai), bansos, dan sebagainya sebagai bantuan yang diberikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengrajin untuk membantu mengelola usahanya kembali.

Kasi Perencanaan Desa Cipacing menyatakan bahwa selama pandemi Covid-19, dana desa difokuskan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT, dan program ketahanan pangan sebagai amanat dari Peraturan Presiden. Menurutnya, sekalipun digembor-gemborkan mengenai otonomi desa, yang mana desa memiliki kebebasan dalam menganggarkan untuk kegiatan maupun program-program desa, namun pada kenyataannya masih ada campur tangan dari pemerintah tingkat atas, sehingga desa pun masih mempertanyakan di mana kewenangan desa. Meski begitu, melihat kondisi pandemi Covid-19 yang sudah mulai mereda, telah ada

---

<sup>19</sup> Seksi Informasi Hukum Ditama Binbangkum, "Pelaku UMKM Dapat Bantuan Pemerintah Sebesar Rp 2,4 Juta," 2023, <https://jdih.bpk.go.id/File/Download/19c81472-e8ab-4f7d-9886-92ff9ff23f97/Pelaku%20UMKM%20dapat%20Bantuan%20Pemerintah%202,4%20Juta.pdf>.

pengurangan anggaran untuk Covid-19 maupun BLT. Dana desa pun sudah mulai dialokasikan pada pembangunan desa, seperti untuk jalan, air bersih, rumah tidak layak huni, serta fasilitas lainnya yang perlu diperbaiki.

Desa tidak dapat membuat program sendiri, melainkan mengadopsi dari kebutuhan atau usulan masyarakat desa. Biasanya terdapat musyawarah yang berasal dari tingkat RW, kemudian tingkat dusun, dan pada akhirnya setiap dusun memberikan usulannya masing-masing di tingkat desa yang kemudian didiskusikan program mana yang menjadi prioritas masyarakat sehingga desa perlu merealisasikan program tersebut. Desa pun merangkul segala usulan dari masyarakat, begitupun untuk UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing. Di sisi lain, pengrajin selaku pelaku usaha perlu aktif dalam mengusulkan kebutuhannya yang menjadi prioritas masyarakat agar pemerintah desa dapat membantu merealisasikannya. Sebab, pendekatan yang berlaku saat ini adalah *bottom-up planning*, sehingga menurut aparat pemerintah desa, masyarakat desa khususnya pengrajin perlu aktif dalam mengusulkan kegiatan atau kebutuhan lain yang diinginkan, terutama dalam hal peningkatan perekonomian.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, terdapat 3 tahapan dalam pemberdayaan: *pertama*, penyadaran. Dalam hal ini, yang dilakukan pemerintah desa selama pandemi Covid-19 berlangsung adalah sosialisasi mengenai bahaya Covid-19, sehingga diharapkan masyarakat desa dapat mematuhi kebijakan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan dan peraturan lainnya guna terhindar dari bahaya Covid-19. Adapun sosialisasi lain yang diberikan terkait bantuan-bantuan atau bansos untuk masyarakat setempat.

*Kedua*, pengkapasitasan. Dalam hal ini, pemberian pelatihan-pelatihan atau program guna meningkatkan keterampilan pelaku usaha belum dapat diberikan pemerintah desa, sebab terkendala pandemi Covid-19. Hal ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak memperbolehkan mengadakan suatu perkumpulan, sehubungan dengan pentingnya mematuhi protokol kesehatan guna terhindar dari bahaya Covid-19.

*Ketiga*, pendayaan. Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa selama pandemi Covid-19, terdapat kebijakan mengenai anggaran dana desa, sehingga pemerintah desa tidak dapat semena-mena menganggarkan dana khusus untuk UMKM atau kelompok pengrajin. Oleh sebab itu, melalui bantuan-bantuan yang telah disosialisasikan pemerintah desa, terutama bagi para pelaku usaha atau kelompok pengrajin, perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, baik itu untuk kebutuhan modal pengrajin atau usaha lain yang dirasa dapat membantu meningkatkan perekonomian selama pandemi Covid-19 berlangsung.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*.

Hal yang serupa dikatakan oleh Pemegang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sumedang, bahwa pada tahun 2020-2022 desa harus menganggarkan untuk penanganan Covid-19 minimal 8 persen dari total pagu yang diterima desa. Selain itu, perlunya anggaran untuk BLT yang kebijakannya selalu berubah-ubah, dan program ketahanan pangan sebanyak 20 persen.

Meskipun pada akhir 2022 pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, namun desa tetap harus menganggarkan pada penanganan Covid-19 sebanyak 8 persen. Apabila terdapat sisa anggaran Covid-19, maka dapat dianggarkan untuk kegiatan lain di desa, tentunya sesuai hasil musyawarah desa. Selain itu, di tahun 2023 ini sudah ada pengurangan anggaran untuk BLT.

Begitupun yang dirasakan pengrajin, bahwa mereka belum mendapatkan bantuan dana ataupun modal dari pemerintah desa. Adapun bantuan yang di dapat, berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kementerian sosial. Menurut pengakuan salah satu pengrajin, dana yang diberikan tidak dapat disisihkan untuk membeli bahan baku, sebab selama pandemi Covid-19 sangat sedikit yang membeli kerajinan, sehingga mereka memilih untuk menghabiskan dana tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pihak pemerintah desa mempercayai bahwa kelompok pengrajin telah memahami betul mengenai UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing, baik mulai dari hal produksi kerajinan hingga pada pemasaran produk, sebab keterampilan dalam membuat kerajinan telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga, pemerintah desa telah mempercayakan pada kelompok pengrajin untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha kerajinan tersebut. Untuk saat ini, kondisi pandemi Covid-19 sudah mulai mereda, sehingga kelompok pengrajin secara perlahan mulai memproduksi dan memasarkan kerajinannya kembali meskipun pesanan kerajinan belum sama seperti dahulu.

## **B. Ketahanan Ekonomi Kelompok Pengrajin di Masa Pandemi Covid-19**

Ketahanan ekonomi adalah istilah yang mengacu pada kemampuan untuk pulih atau menyesuaikan diri dengan dampak negatif dari guncangan eksternal ekonomi.<sup>21</sup> Sesuai dalam penelitian ini, akan meninjau lebih dalam mengenai ketahanan ekonomi dari kelompok pengrajin yang banyak mengalami gulung tikar untuk pulih atau menyesuaikan diri akibat guncangan eksternal, yakni pandemi Covid-19. Adapun indikator yang mengukur sebuah ketahanan ekonomi menurut Briguglio salah satunya adalah pembangunan sosial.

Midgley memberikan penjelasan terkait pembangunan sosial, yakni sebuah proses dari perubahan sosial yang sudah direncanakan, yang dibuat untuk mengangkat kesejahteraan

---

<sup>21</sup> Briguglio dkk., "Economic Vulnerability and Resilience."

masyarakat melalui proses pembangunan ekonomi yang dinamis.<sup>22</sup> Tiga strategi yang diberikan Midgley guna menciptakan sebuah pembangunan sosial adalah pembangunan sosial oleh individu, pembangunan sosial oleh pemerintah, dan pembangunan sosial oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Sejalan dengan penelitian ini, pembangunan sosial yang dilakukan adalah pembangunan sosial oleh masyarakat, yang mana masyarakat saling bergotong royong dan bekerja sama secara harmonis dengan tujuan yang sama yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup, memecahkan permasalahan, serta berusaha menciptakan kesempatan demi memperbaiki hidup.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, kelompok pengrajin saling bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memecahkan permasalahan bersama terkait ekonomi, dan berusaha memperbaiki kehidupan mereka.

Pihak pemerintah desa memang belum sempat memberikan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu solusi kelompok pengrajin agar dapat lebih produktif di masa pandemi Covid-19, sebab telah ada kebijakan mengenai alokasi dana desa yang sudah difokuskan pada pencegahan dan penanganan Covid-19, BLT, dan program ketahanan pangan, sehingga pemerintah desa sulit untuk membuat program-program desa. Terlebih, kelompok pengrajin harus lebih aktif dalam memberikan usulannya dalam musyawarah desa agar dapat dijadikan prioritas kegiatan desa. Oleh sebab itu, untuk menciptakan sebuah ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19, maka kelompok pengrajin berinisiatif untuk membuat sebuah kegiatan yakni Lembur Tohaga Lodaya dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Medal Harapan Jaya.

Di tahun 2020, Hendrik Andiyana, selaku Ketua Lembur Tohaga Lodaya Desa Cipacing memberikan pernyataan bahwa dibentuknya Lembur Tohaga Lodaya adalah atas inisiatif masyarakat desa terutama pelaku UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor yang memiliki sumber daya unggul serta potensi kreativitas masyarakat yang sangat baik. Dalam Lembur Tohaga Lodaya, terdapat 9 bidang yang diunggulkan, yakni pertanian hidroponik, lembur disiplin tohaga lodaya tolak Covid-19, sentra konveksi tohaga, kampung KB, pengrajin pisau tradisional, sentra layang-layang, sentra senapan angin, sentra mebel, dan sentra kerajinan tangan.

Selain Lembur Tohaga Lodaya, masyarakat desa pun berinisiatif untuk membentuk sebuah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Medal Harapan Jaya. Keberadaan KUBE Medal Harapan Jaya mendapatkan dukungan dari tiga pilar Desa Cipacing, yakni Kepala Desa Cipacing, Bhabinkamtibnas, dan Babinsa. Adapun latar belakang dibentuknya KUBE Medal Harapan Jaya

---

<sup>22</sup> J. Midgley, *Social Development: The Developmental Perspective In Social Welfare* (London: SAGE Publication, 1995).

<sup>23</sup> J. Midgley, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Diterjemahkan oleh Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas (Jakarta: Diperta Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2005).

<sup>24</sup> Midgley.

adalah atas inisiatif masyarakat desa khususnya kelompok pengrajin dalam meningkatkan dan menggali potensi masyarakat desa agar terwujud sebuah kesejahteraan masyarakat. KUBE Medal Harapan Jaya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, *home industry*, perdagangan dan jasa, serta kerajinan.

Salah satu produksi dari unit KUBE Medal Harapan Jaya adalah telur asin. Melalui produksi telur asin, masyarakat desa mampu menciptakan peluang usaha. Ketua kelompok salah satu unit dari KUBE Medal Harapan Jaya, Ani Susilawati, mengaku bahwa akibat adanya kebijakan pemberlakuan PPKM, dirinya berhenti membuat kerajinan tangan panahan, sumpit, atau aksesoris karena sulitnya pemasaran. Disamping itu, Ani mengencarkan pembuatan telur asin, hingga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, termasuk KUBE Medal Harapan Jaya pun telah disahkan, sehingga legalitasnya menjadi lebih jelas.

Melalui KUBE Medal Harapan Jaya, kelompok pengrajin dapat bertahan di masa pandemi Covid-19. Pengrajin mengakui bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kerajinan saja, sebab mereka akan sulit untuk bertahan, terutama di masa pandemi Covid-19 jarang sekali pengrajin mendapatkan pesanan kerajinan, akibat terbatasnya mobilitas dalam memasarkan kerajinan tersebut. Namun, dengan adanya KUBE Medal Harapan Jaya, pengrajin dapat kembali produktif untuk membuat berbagai macam produk sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Komunikasi yang terjalin antar anggota berjalan dengan baik, setiap unit KUBE Medal Harapan Jaya pun sering mengadakan rapat rutin. Hubungan antara pengurus KUBE Medal Harapan Jaya dengan partner bisnis pun lancar. Selain memiliki partner bisnis masing-masing, KUBE Medal Harapan Jaya mengalokasikan produknya ke UMKM Sumedang dan lingkungan sekitar desa. Anggota KUBE Medal Harapan Jaya berharap kegiatannya dapat terus berlanjut dan masyarakat semakin aktif bergeliat pada bidangnya masing-masing sehingga KUBE Medal Harapan Jaya semakin maju.



Gambar 2. Kegiatan KUBE Medal Harapan Jaya

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Meski belum sempat memberikan pemberdayaan masyarakat pada kelompok pengrajin, pihak pemerintah desa tetap berupaya dalam hal pelayanan, yakni dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan Lembur Tohaga Lodaya maupun KUBE Medal Harapan Jaya, melalui tiga pilar Desa Cipacing, yakni Kepala Desa, Bhabinkamtibnas, dan Babinsa. Adapun bentuk dukungan yang diberikan adalah memfasilitasi kemudahan perizinan, agar secara legalitas kegiatan Lembur Tohaga Lodaya maupun KUBE Medal Harapan Jaya terjamin kelangsungan kegiatan usahanya.

Oleh sebab itu, sesuai dengan pendapat yang diutarakan Briguglio, bahwa ketahanan ekonomi merupakan sebuah sistem perekonomian dalam menahan atau bangkit dari pengaruh negatif akibat guncangan eksternal.<sup>25</sup> Maka dapat dikatakan kelompok pengrajin Desa Cipacing mampu bertahan dan bangkit kembali dari guncangan eksternal, yakni pandemi Covid-19 yang memberikan dampak buruk pada UMKM Desa Cipacing, melalui kegiatan Lembur Tohaga Lodaya dan KUBE Medal Harapan Jaya sebagai kegiatan masyarakat terutama pengrajin selaku pelaku usaha untuk bertahan dan meningkatkan perekonomiannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa kelompok pengrajin sudah mandiri dan mengetahui lebih dalam mengenai kerajinan, mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Namun, kelompok pengrajin tetap perlu arahan dan bantuan dari pemerintah desa, terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19. Setidaknya, pemerintah desa

---

<sup>25</sup> E. S. Tasri, Kasman K., dan M. Irwan, *Kerentanan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan* (Padang: Sukabina Press, 2021).

dapat membantu dalam hal ketahanan ekonomi masyarakat, dengan memberikan kegiatan atau program positif lainnya yang termasuk dalam pemberdayaan masyarakat, melalui tiga tahapan yakni penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Di sisi lain, terdapat dana desa yang diprioritaskan dalam membiayai pemberdayaan masyarakat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan pemegang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sumedang, mengatakan bahwa sebelum dana desa dipakai untuk mendanai sebuah kegiatan, perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Biasanya musyawarah terjadi dari tingkat RW, kemudian didiskusikan di tingkat dusun. Selanjutnya, setiap kepala dusun memberikan usulannya masing-masing di tingkat desa. Terakhir, diputuskan kebutuhan apa yang paling menjadi prioritas bersama agar dana desa dapat menganggarkan untuk hal tersebut. Dalam hal ini, masyarakat desa terutama kelompok pengrajin perlu aktif dalam memberikan usulan-usulan yang menjadi kebutuhan mereka saat itu. Sehingga baik dari sisi aparat pemerintah desa maupun masyarakat desa harus ada kerja sama untuk saling berdiskusi demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Terkait otonomi desa, hendaknya desa diberikan otonomi seluas-luasnya agar desa dapat dengan bebas mengurus dan mengatur urusan pemerintah daerahnya, mencakup kebijakan pemberian pelayanan, peningkatan peran, serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting diberikan mengingat pemerintah daerah mengetahui lebih dalam mengenai karakteristik, keterampilan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki masyarakat daerahnya. Sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah setempat agar dapat lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya, yang salah satunya dapat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Kasi Perencanaan Desa Cipacing, desa belum memiliki kebebasan dalam menganggarkan dana yang dimilikinya, terutama dalam hal pembuatan program atau kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat desa. Ditambahkannya penjelasan dari pemegang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Sumedang, bahwa sebetulnya otonomi desa itu ada, namun memang persentase dana yang diberikan untuk desa, pemerintah pusat yang mengaturnya. Meski begitu, desa tetap harus bisa mengaturnya. Disamping itu, desa memiliki pendapatan yang bersumber dari desa atau dapat dikatakan PAD (Pendapatan Asli Desa), meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah. Adapun hasil usaha desa yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Kredit Desa, dan Koperasi Desa. Namun, yang masih menjadi permasalahan adalah tidak banyak desa yang bisa mengembangkan PAD tersebut. Sehingga desa harus pintar dalam mengelola BUMDes-nya masing-masing.

Oleh karenanya, dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, maka pemerintah desa memerlukan sebuah kewenangan dalam penyelenggaraannya. Adapun tujuan kewenangan tersebut untuk mendorong prakarsa, gerakan, serta partisipasi masyarakat desa agar lebih mengembangkan potensi serta aset desa. Hal ini dilakukan guna tercipta sebuah kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari otonomi daerah sendiri. Dalam hal ini, selain pemerintah yang perlu lebih peka terhadap keadaan dan permasalahan desa, masyarakat desa pun perlu berperan aktif untuk berpartisipasi membangun dan mengembangkan desa menuju arah yang lebih baik. Sehingga, pentingnya menjalin kerja sama antara kedua belah pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama.

## **KESIMPULAN**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan, terutama pada sektor ekonomi, yang salah satunya berdampak pada eksistensi UMKM. Begitupun yang terjadi pada UMKM kerajinan tangan Desa Cipacing yang sempat mengalami gulung tikar. Tak terduga bahwa penyebaran Covid-19 begitu cepat, sehingga upaya pemerintah desa sangat diperlukan. Terkait hal tersebut, terdapat dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi serta potensi yang dimiliki desa. Namun, akibat pandemi Covid-19, pemerintah desa belum sempat memberikan pemberdayaan masyarakat, sebab telah diputuskan kebijakan mengenai anggaran dana desa agar difokuskan pada pencegahan dan penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program ketahanan pangan.

Akibat pemberdayaan masyarakat yang belum sempat diberikan pemerintah desa, maka untuk menciptakan sebuah ketahanan ekonomi di masa pandemi Covid-19, kelompok pengrajin berinisiatif membentuk sebuah kegiatan yakni Lembur Tohaga Lodaya dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Medal Harapan Jaya. Hingga saat ini, KUBE Medal Harapan Jaya memudahkan masyarakat desa untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang sebelumnya mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatasnya mobilitas dalam melakukan pemasaran kerajinan tangan. Meski belum sempat memberikan pemberdayaan masyarakat di masa pandemi Covid-19, pemerintah desa tetap berupaya dalam hal pelayanan, yakni dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan Lembur Tohaga Lodaya dan KUBE Medal Harapan Jaya. Adapun bentuk dukungan yang dimaksud adalah memfasilitasi kemudahan perizinan agar secara legalitas kegiatan Lembur Tohaga Lodaya maupun KUBE Medal Harapan Jaya terjamin kelangsungan kegiatan usahanya.

## SARAN DAN REKOMENDASI

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat lebih dikembangkan terutama mengenai penelitian pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dalam cakupan yang lebih luas. Sebab masih banyak permasalahan lain terkait pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah yang lebih menarik untuk diteliti.

Selain itu, adanya pengembangan dari penggunaan teori pemberdayaan masyarakat maupun teori ketahanan ekonomi. Sebab masih banyak teori-teori lain yang dapat dikaji dalam penelitian guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang semakin banyak mengalami pembaharuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Indah, Maria Veronika Roesminingsih, dan Wiwin Yulianingsih. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Pendidikan Nonformal* 16, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.17977/um041v16i1p12-20>.
- Briguglio, Lino, Gordon Cordina, Nadia Farrugia, dan Stephanie Vella. "Economic Vulnerability and Resilience." *UNUWIDER* 55 (t.t.).
- Hardilawati, Wan Laura. "Strategi Bertahan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>.
- Kurniawan, I. "Berkunjung ke Jatinangor, Wabup Sumedang Pastikan Bantu Pelaku UMKM." *prfmnews.id* (blog), 2020. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-13712105/berkunjung-ke-jatinangor-wabup-sumedang-pastikan-bantu-pelaku-umkm?page=2>.
- Midgley, J. *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Diterjemahkan oleh Dorita Setiawan dan Sirojudin Abbas. Jakarta: Diperta Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- . *Social Development: The Developmental Perspective In Social Welfare*. London: SAGE Publication, 1995.
- Mina, Risno. "Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup." *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 2020. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.
- Putri, A. N. K. "Perjuangan Pengrajin Desa Cipacing Untuk Dapatkan Pengakuan." *ayobandung.com* (blog), 2017. <https://www.ayobandung.com/finansial/pr-79624882/perjuangan-pengrajin-desa-cipacing-untuk-dapatkan-pengakuan?page=2>.
- Redaksi KPPN BKT. "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya." *KPPN Bukittinggi* (blog), 2021. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desapengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>.

Anisa Putri Sari, Utang Suwaryo, Novie Indrawati Sagita: Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi

- Romarina, Arina. "Economic Resilience pada Industri Kreatif Gunamenghadapi Globalisasi Dalam Rangka Ketahanan Nasional." *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 1 (2016).
- Ryan, Jacko. "Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanganan COVID-19: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21, no. 02 (2022).
- Sari, Ayu Esteka, Salamah Salamah, dan Albetris Albetris. "Dampak Dimensi Intellectual Capital Terhadap Knowledge Management Pendamping Desa Di Kabupaten Kerinci." *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.102>.
- Seksi Informasi Hukum Ditama Binbangkum. "Pelaku UMKM Dapat Bantuan Pemerintah Sebesar Rp 2,4 Juta," 2023. <https://jdih.bpk.go.id/File/Download/19c81472-e8ab-4f7d-9886-92ff9ff23f97/Pelaku%20UMKM%20dapat%20Bantuan%20Pemerintah%202,4%20Juta.pdf>.
- Shofiana, A. *Implementasi Program Afiliasi Berbasis Virtual Team Dalam UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19*. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, 2020.
- Tadanugi, Imanuel Natoralemba. "Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamonjengi Kecamatan Mori Kabupaten Morowali Utara." *Jurnal Ilmiah Administratie* 10, no. 1 (2020).
- Tamimah. "Geliat Pengrajin Desa Cipacing." *Djatinangor* (blog), 2018. <http://djatinangor.com/2018/03/10/geliat-pengrajin-desa-cipacing>.
- Tasri, E. S., Kasman K., dan M. Irwan. *Kerentanan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Kerusakan Lingkungan*. Padang: Sukabina Press, 2021.
- Ulumiyah, Ita. "Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 5 (2013).
- Wrihatnolo, Randy R., dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Yuliana. "Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur." *Wellness And Healthy Magazine* 2 (2020).